

**Judul** : Jaga keseimbangan alam, DPR: fungsi hutan tak boleh diubah  
**Tanggal** : Jumat, 06 Februari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Jaga Keseimbangan Alam DPR: Fungsi Hutan Tak Boleh Diubah

SUMBER: IG PRIGADI



**Alex Indra Lukman**

**KETUA** Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menegaskan alasan kepentingan strategis nasional tak bisa lagi jadi dalih untuk mengubah fungsi hutan. Sudah saatnya cara pandang soal pengelolaan hutan dirombak total. Sebab, ada bentang alam tertentu yang secara prinsip tidak boleh disentuh, apa pun alasannya.

"Kita harus mulai mengubah cara berpikir. Karena, ada fungsi hutan yang dengan alasan apa pun, tidak mungkin diubah. Kalau dia adalah hulu sungai, ya sudah, itu mesti tetap hutan. Titik. Apa pun alasannya, tak mungkin diubah," tegas Alex.

Penegasan itu disampaikan Alex saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda penjelasan alih fungsi lahan di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). RDP dihadiri pejabat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam paparannya, Alex menyinggung dampak nyata alih fungsi lahan yang tak terkendali. Contohnya, bencana besar akibat siklon tropis yang melanda Sumatera. Hal itu tak bisa dilepaskan dari hilangnya sekitar 1,4 juta hektare hutan tropis akibat alih fungsi men-

jadi kawasan pertambangan dan perkebunan sawit.

Perubahan tutupan lahan tersebut telah merusak fungsi hidrologis hutan. Kemampuan tanah menyerap air menurun drastis, memicu aliran permukaan yang bersifat destruktif dan berujung pada bencana besar. Dampaknya sangat masif. Tercatat 967 jiwa meninggal dunia dan 262 orang dinyatakan hilang, menjadikannya salah satu bencana terburuk dalam sejarah modern Indonesia.

Sebanyak 3,3 juta jiwa terdampak, kehilangan tempat tinggal, harta benda, hingga pola hidup sehari-hari. Kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp 68,8 triliun, dengan 3.500 bangunan rusak berat, 271 akses jembatan hancur, serta 282 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan.

Panja ini dibentuk, untuk kemudian dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan terkait alih fungsi lahan, sehingga bencana serupa tak lagi berulang di masa depan," ujar Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Barat.

Ia menegaskan, rekomendasi yang akan dilahirkan Panja Alih Fungsi Lahan pada akhirnya bermuara pada tujuan utama bernegara: melindungi segenap tumpah darah Indonesia, terutama manusianya.

"Saya mendorong pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut), secara tegas tidak lagi mengizinkan diubahnya fungsi dari bentang alam. Itu secara fundamental berfungsi untuk menjaga ekosistem dan keseimbangan alam, seperti hulu sungai dan lereng gunung," tegasnya.

Ketegasan itu mutlak diperlukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera. "Akibat salah kebijakan alih fungsi lahan yang merusak ekosistem hulu," tutup wakil ketua Komisi IV DPR itu. ■ **BYU**